

DAMPAK BREXIT TERHADAP GLOBAL PASSPORT POWER RANK INGGRIS TAHUN 2021

Salsabila¹

Abstract: *Global Passport Power Rank is a term for ranking the strength of passports owned by each country. The assessment indicator is then carried out by looking at whether a country requires a visa, namely a document permitting someone to enter a country that is obtained at the embassy. When Brexit officially takes effect on 01 January 2021, the UK will no longer be part of the free market member of the EU. This had consequences for the free movement of people and labor from England. As it has been explained about how the strength of a passport can be calculated using the free visa received by a country, the formation of the Brexit policy certainly means that the UK no longer has the right to free movement. This research is descriptive qualitative writing using library research data collection techniques, namely collecting the necessary data and information through books, journals, articles and the internet. The type of data used is secondary data with qualitative data analysis techniques that construct and analyze data to obtain research results. Through the concept of migration by Lee, it is known that the results of this study show that Brexit has had a decreasing and increasing impact on the British passport ranking in the period 2016-2023. From this there are changes in the volume, development and changing flow of British migration. Where before Brexit, migration was dominated by European Union citizens, but after Brexit it was dominated by non-EU citizens. The impact of the reduction in passports does not only come from Brexit, but there are several other additional factors such as the Covid 19 pandemic, the death of Queen Elizabeth, and the change of British prime minister.*

Keywords: *British passport, Global Passport Power, Migration, Brexit, European Union*

Pendahuluan

Global Passport Power Rank merupakan sebuah istilah untuk perbandingan kekuatan paspor yang dimiliki oleh setiap negara. Hal ini dapat memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana kekuatan paspor yang dipegang oleh suatu negara mampu menentukan penerimaan negara lain dalam pemberian visa serta banyaknya fasilitas keimigrasian yang dapat diperoleh. Sampai dengan tahun 2023, pemeringkatan global passport power rank dilakukan oleh Indeks Henley Paspor. Indeks Henley Paspor merupakan sebuah indeks yang memeringkat paspor suatu negara yang didasarkan pada data eksklusif dari International Air Transport Association (IATA). Indikator penilaian kemudian dilakukan dengan melihat apakah suatu negara memerlukan visa yakni sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang diperoleh di kedutaan (Henley Global, n.d.).

Pada tahun 2015, lima negara dengan ranking tertinggi menurut Indeks Henley Paspor adalah Jerman, Inggris, Finlandia, Swedia, dan Amerika Serikat (Henley Global, 2015). Hal ini terlihat pada gambar 1, dari pemeringkatan tersebut Inggris menduduki posisi pertama bersamaan dengan Jerman dengan akses bebas visa ke 173 negara. Hal ini menunjukkan bahwa paspor Inggris memiliki akses yang luas dalam pergerakan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : skysabila@gmail.com

lintas negara. Posisi global passport rank Inggris yang tinggi ini juga berdampak pada munculnya persepsi bahwa pemegang paspor Inggris memiliki kualitas perjalanan dan keamanan yang lebih baik.

Gambar 1. Pemingkatan *Global Passport Rank* Tahun 2015



COUNTRY	RANK	ACCESS
 Germany	1	173
 United Kingdom	1	173
 Finland	2	172
 Sweden	2	172
 United States	2	172
 Denmark	3	171
 France	3	171
 Italy	3	171
 Japan	3	171
 Luxembourg	3	171
 Somalia	108	30
 Iraq	109	29
 Afghanistan	110	25

Sumber: <https://www.henleyglobal.com>

Tingginya posisi ranking paspor Inggris didukung oleh keberadaan Inggris sebagai anggota Uni Eropa (UE) yang dimana dalam UE terdapat pasar bebas dan Schengen Area. Schengen Area dan pasar bebas UE merupakan salah satu hasil dari kebijakan migrasi umum UE yang ditujukan untuk menguntungkan para migran negara asal dan negara tujuan. Hal ini kemudian memberikan kesempatan untuk para migran memperbaiki keadaan hidup mereka dan negara tujuan untuk mengatasi kebutuhan pasar tenaga kerja (Euro Commision, n.d)

Ketika Brexit resmi diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2021, Inggris tidak lagi menjadi bagian anggota pasar bebas UE. Hal ini berkonsekuensi terhadap pergerakan bebas manusia dan tenaga kerja dari Inggris. Seperti yang telah dijabarkan tentang bagaimana kekuatan paspor dapat dihitung menggunakan *free visa* yang diterima oleh suatu negara, terbentuknya kebijakan Brexit tentu membuat Inggris tidak lagi mempunyai hak pergerakan bebas. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak Brexit terhadap *global passport power rank* Inggris tahun 2021.

Kerangka Teori

Teori Migrasi

Secara umum, migrasi didefinisikan sebagai perubahan tempat tinggal permanen atau semipermanen. Tidak ada batasan yang diberikan pada perpindahan jarak pada tindakan migrasi yang dilakukan. Tidak menghitung seberapa pendek maupun berapa lama atau seberapa mudah maupun sulit, tindakan migrasi tetap melibatkan asal, tujuan, dan beberapa rintangan yang akan mengintervensi (Lee, 1996).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dan proses migrasi menurut Lee kemudian dibagi menjadi dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Faktor yang berhubungan dengan daerah asal.
2. Faktor yang berhubungan dengan daerah tujuan.
3. Intervensi hambatan.
4. Faktor pribadi.

Lee kemudian menguraikan keempat kategori ini dengan menunjukkan bahwa di setiap kategori terdapat beberapa faktor yang bertindak untuk menjauhkan, menahan, atau menarik manusia ke wilayah tersebut.

Keputusan untuk bermigrasi kemudian merupakan hasil dari interaksi antara keempat faktor tersebut. Lee menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi tidak pernah sepenuhnya rasional sehingga selalu mungkin untuk menemukan pengecualian untuk semua jenis generalisasi tentang migrasi. Dalam kerangka konseptual ini, Lee kemudian merumuskan beberapa hipotesis untuk empat jenis faktor yang terkait dengan migrasi. Hipotesis ini kemudian mencakup volume migrasi, perkembangan aliran dan arus balik migrasi, dan karakteristik migran untuk menjelaskan mengapa beberapa orang bermigrasi dan yang lainnya tidak (Lee, 1996).

Dalam hipotesis volume migrasi, Lee mengusulkan serangkaian hipotesis sebagai berikut:

- a. Volume migrasi dalam suatu wilayah tertentu bervariasi menurut tingkat keanekaragaman wilayah yang termasuk ke dalam wilayah tersebut
- b. Volume migrasi berbeda-beda sesuai dengan keragaman penduduk di wilayah tersebut
- c. Volume migrasi akan semakin sedikit dengan semakin banyaknya rintangan yang mengintervensi.
- d. Volume migrasi bervariasi dengan fluktuasi ekonomi.
- e. Kecuali dilakukan pemeriksaan yang ketat, baik volume maupun laju migrasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu
- f. Tingkat dan volume migrasi berbeda-beda tergantung keadaan kemajuan di suatu daerah.

Dalam hipotesis sehubungan dengan perkembangan aliran dan arus balik migrasi, Lee menyarankan enam hipotesis sebagai berikut:

- a. Migrasi cenderung berlangsung sebagian besar di dalam aliran yang terdefinisi dengan baik
- b. Untuk setiap aliran migrasi utama, aliran lawan berkembang
- c. Efisiensi aliran tinggi jika faktor di daerah asal lebih bagus dalam perkembangan aliran.
- d. Efisiensi arus dan arus balik cenderung rendah, jika asal dan tujuannya sama.
- e. Efisiensi aliran migrasi akan tinggi jika rintangan yang menghalangi tergolong besar.
- f. Efisiensi aliran migrasi bervariasi dengan kondisi ekonomi.

Dan akhirnya, Lee menguraikan hipotesis terakhirnya terkait karakteristik para migran sebagai berikut:

- a. Migran bersifat selektif. Dikarenakan perbedaan faktor personal, kondisi di tempat asal dan tujuan, serta hambatan yang mengintervensi maka cara tiap merespon hal ini berbeda tergantung oleh tiap individu.
- b. Migran yang menanggapi faktor-faktor positif di tempat daerah tujuan cenderung diseleksi secara positif.
- c. Migran yang menanggapi faktor negatif di daerah asal cenderung diseleksi secara negatif.
- d. Menyatakan semua migran, seleksi cenderung bimoda
- e. Derajat seleksi positif meningkat seiring dengan kesulitan mengintervensi rintangan.

- f. Kecenderungan yang meningkat untuk bermigrasi pada tahapan tertentu dalam siklus hidup penting dalam pemilihan migrasi
- g. Karakteristik pendatang cenderung berada di antara karakteristik penduduk di daerah asal dan di daerah tujuan (Lee, 1996).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran data online. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Global Passport Rank Inggris Tahun 2016-2020

Indeks Henley Passport kemudian berperan dalam mempermudah masyarakat umum dalam mengetahui sejauh apa paspor yang mereka pegang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan migrasi. Indeks Henley Passport menggunakan data yang mereka dapatkan dari IATA, indikator penilaian yang dilakukan dengan melihat apakah suatu negara memerlukan Visa untuk memasuki negara yang dituju. Sebagai contoh, pemegang paspor Indonesia memerlukan Visa Inggris jika mereka ingin memasuki negara Inggris.

Jika paspor suatu negara tidak memerlukan visa untuk pergi ke negara lain maka akan diberikan skor 1, hal ini juga berlaku jika paspor tersebut mendapatkan Visa On Arrival atau Electronic Travel Authority (eTA). Akan tetapi jika paspor suatu negara perlu mengajukan visa atau eVisa maka akan diberikan skor 0 (Henley Global, n.d.). Sebagai contoh, pemegang paspor Jepang tidak perlu mengajukan visa ke kedutaan Inggris dan dapat memasuki Inggris tanpa memerlukan visa sehingga nilai paspor diberikan 1 untuk Jepang. Akan tetapi pemegang paspor Indonesia perlu mengajukan visa ke kedutaan Inggris saat ingin berkunjung ke Inggris maka nilai paspor yang diberikan ialah 0.

Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki Global Passport Rank yang tinggi. Tercatat pada tahun 2015, paspor Inggris meraih posisi pertama bersamaan dengan Jerman. Akan tetapi pada tahun 2016, posisi paspor Inggris menurun ke posisi ketiga yang kemudian semakin menurun hingga akhirnya Paspor Inggris berada pada posisi ketujuh pada tahun 2021. Turunnya posisi paspor Inggris pada tahun-tahun tersebut dikarenakan terjadinya referendum Brexit yang menyebabkan adanya hubungan yang tidak stabil antara Inggris dan UE.

Ketidakstabilan hubungan antara Inggris dan UE lantas menyebabkan adanya perubahan perizinan Visa, dimana terdapat beberapa negara di UE yang menarik hak free visa ataupun mengurangi durasi pemberlakuan visa yang diberikan. Penurunan posisi Inggris dalam global passport rank tentu menjadi sebuah masalah. Hal ini dikarenakan pemberian maupun penerimaan hak free visa terhadap suatu negara berdampak pada sisi politik dan ekonomi.

Gambar 2. Peringkat Paspor Inggris tahun 2016-2021

Sumber: <https://www.henleyglobal.com>

Pada dasarnya terdapat kegiatan tawar-menawar politik antar negara yang berperan dalam pemberian maupun penerimaan hak *free visa*. Misalnya pada Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama UE-Inggris yang disepakati antara keduanya dengan menetapkan pengaturan preferensi di beberapa bidang. Meskipun Inggris bukan anggota Schengen Area, sebagai anggota UE yang terikat dalam pasar tunggal UE, Inggris masih dapat menikmati fasilitas pergerakan bebas dalam pasar tersebut. Oleh karena itu, Inggris memiliki hak *free visa*.

Kebanyakan negara-negara dengan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka atau dengan model perdagangan bebas akan memberi dan menerima hak *free visa*. Hal ini dikarenakan negara tidak hanya mengirim barang, jasa, dan modal ke negara mitra dagang mereka, tetapi juga termasuk arus manusia (tenaga kerja) yang menyertai hubungan perdagangan ini untuk mempermudah kegiatan perdagangan.

Selain dari itu, memiliki posisi tinggi dalam *global passport rank* menandakan bahwa berarti negara tersebut memiliki kondisi ekonomi dan politik yang ternilai baik dan stabil (Henley Global, n.d). Hal ini tentu akan menyebabkan peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI adalah kategori investasi internasional yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan investor di satu ekonomi di perusahaan penduduk di ekonomi negara lain (eC eUROPA EU, n.d).

Pembatasan visa kemudian dapat menjadi hambatan dalam penanaman FDI. Hal ini dikarenakan pergerakan untuk pelaku bisnis maupun investor menjadi sangat terbatas ditambah dengan perlunya biaya yang besar, tenaga, serta waktu yang lebih banyak untuk pengurusan FDI. Tindakan-tindakan yang dapat mempersulit perjalanan bisnis seperti ini kemudian membuat pelaku bisnis menjadi enggan untuk mengunjungi calon mitra dan menemukan peluang perdagangan serta investasi di luar negeri (Akman, 2016).

Akan tetapi akibat dari referendum Brexit muncullah sebuah hambatan mobilitas yang dalam hal ini adalah dengan pencabutan *free visa* yang diberikan oleh UE untuk Inggris dan sebaliknya. Visa kemudian dapat menjadi sebuah hambatan mobilitas dikarenakan penerapannya tidak hanya memerlukan biaya administrasi yang signifikan tetapi juga biaya ekonomi yang besar sebagai akibat dari hilangnya pariwisata dan perjalanan, perdagangan dan investasi (Czaika dan Neumayer, 2017).

Sebelum Brexit, Inggris adalah yang paling terbuka terhadap imigrasi dan FDI dari ekonomi maju dalam sampel, dengan volume perdagangan yang sebanding sebagai bagian dari PDB. Setelah terjadinya referendum Brexit pada tahun 2016, Inggris menjadi salah satu negara yang paling tidak terbuka untuk perdagangan di antara ekonomi UE, dan berada di ujung bawah sampel untuk FDI dan imigrasi (Adam S.Posen, 2022).

Efek penyusutan perdagangan, FDI, dan angka imigrasi tentu menjadi sebuah permasalahan apalagi hal ini dapat merusak ekonomi Inggris untuk beberapa tahun kedepan. Berkurangnya keterbukaan perdagangan dapat membatasi persaingan untuk perusahaan domestik serta menghambat kemajuan perusahaan. Tenaga kerja yang kurang beragam dan tingkat FDI yang lebih rendah juga dapat menghambat pertumbuhan produktivitas. Sudah menjadi hal yang umum akan peran investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan lapangan kerja di Inggris sangat besar sehingga penurunan peringkat Inggris dalam global passport rank menjadi sebuah permasalahan.

Beberapa penurunan yang telah dijelaskan dari penurunan angka FDI, pertumbuhan PDB Inggris, dan angka migrasi ke Inggris kemudian berdampak pada turunnya global passport rank Inggris. Ketidakstabilan arah politik Inggris dengan UE menjadi salah satu faktor utama dari penurunan ini. Selain daripada itu pada tahun 2020 tepatnya bulan Januari, Inggris mengalami pandemi Covid-19.

Dampak Brexit Terhadap *Global Passport Power Rank* Inggris 2021-2023

Brexit membawa konsekuensi sendiri terhadap *global passport power rank* Inggris. *Global Passport Rank* Inggris merupakan hal yang bergantung pada migrasi sehingga penurunan ini dijelaskan di dalam Teori Migrasi Lee. Berdasarkan teori Lee, penurunan *Global Passport Rank* dapat dikarakteristikan dalam 3 hal, yakni volume migrasi perkembangan aliran dan arus balik migrasi, dan karakteristik migran.

a. Volume Migrasi

Setelah berlakunya Brexit pada Januari 2021, Inggris kemudian memperkenalkan sistem imigrasi baru yang mengakhiri kegiatan pergerakan bebas antara masyarakat Inggris dan UE. Sistem ini kemudian mulai berlaku bersamaan dengan Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama Inggris-UE yang telah mencantumkan aturan baru dalam perpindahan migrasi masuk maupun keluar dari Inggris dengan alasan pekerjaan, belajar, maupun keluarga. Pemberlakuan sistem ini kemudian berdampak pada turunnya angka migrasi dari negara-negara UE (Mathers, 2023).

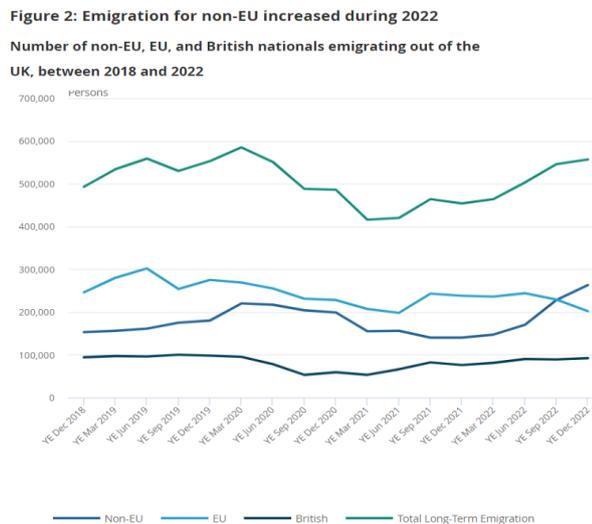
Akhir dari pergerakan bebas antara Inggris dan UE lantas mengembalikan keadaan dimana petugas perbatasan dapat mengusir, menolak, maupun mengizinkan masyarakat UE untuk masuk kedalam wilayah Inggris. Akibat hal tersebut, banyak warga UE yang dihentikan di perbatasan untuk diinterogasi serta diberikan penolakan izin masuk (Sumption, 2022).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penolakan izin masuk warga UE, salah satunya ialah seperti volume perjalanan secara keseluruhan, pengambilan keputusan oleh petugas perbatasan, dan pengetahuan serta pemahaman para migran terkait perubahan sistem imigrasi yang baru. Hal ini kemudian menunjukkan hipotesis volume migrasi terkait dengan semakin sedikitnya volume migrasi akibat semakin banyaknya rintangan.

Dalam perihal ini rintangan yang dimaksud ialah penurunan angka migrasi Inggris yang kemudian berdampak pada kekurangan tenaga kerja yang tengah dialami oleh Inggris. Kurangnya warga UE yang datang ke Inggris lantas berdampak besar pada ekonomi di Inggris, khususnya dalam sektor konstruksi dan industri. Hal ini kemudian menunjukkan hipotesis volume migrasi yang berhubungan dengan volume migrasi bervariasi dengan fluktuasi ekonomi.

Dari grafik dibawah dapat dilihat angka emigrasi Inggris tercatat dari tahun 2018 hingga 2022, dimana biru tua dilambangkan untuk angka emigrasi penduduk non-UE, biru muda untuk penduduk UE, dan warna merah tua untuk penduduk Inggris. Dari grafik tersebut terlihat bagaimana adanya kenaikan signifikan akan kegiatan emigrasi dari Inggris yang dilakukan oleh penduduk UE, tercatat pada akhir pendataan yakni Desember 2022 sebanyak 202,000 penduduk UE melakukan emigrasi dari Inggris.

Grafik 1. Data Emigrasi Inggris Tahun 2018-2022



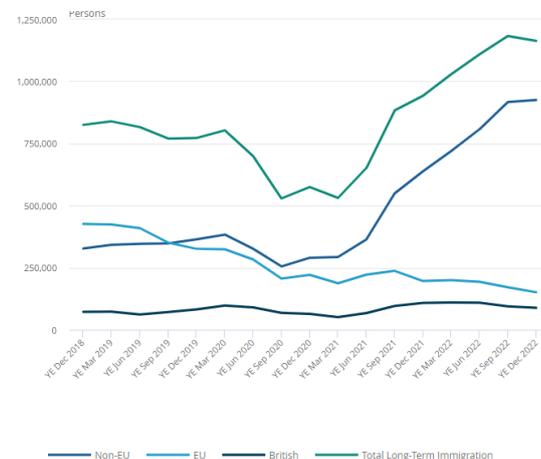
Sumber: <https://www.ons.gov.uk>

Akan tetapi turunnya angka migrasi UE ke Inggris kemudian memunculkan peluang baru untuk warga non-UE untuk memasuki Inggris. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini dimana ada peningkatan migrasi oleh warga non EU kedalam Inggris yang ditandai dengan warna biru tua. Selepas dari pemberlakuan Brexit, Pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah strategi untuk meningkatkan perekrutan siswa internasional ke Inggris dan mendiversifikasi negara tempat siswa direkrut.

Grafik 2. Data migrasi ke Inggris tahun 2018-2022

Figure 1: Long-term immigration in 2022 was largely driven by non-EU nationals

Number of non-EU, EU, and British nationals immigrating into the UK, between 2018 and 2022



Sumber: <https://www.ons.gov.uk>

b. Perkembangan Aliran dan Arus Balik Migrasi

Referendum Brexit dan pandemi memicu perlambatan pertumbuhan lapangan kerja UE karena banyak pekerja UE merasa kurang tertarik untuk bekerja di Inggris. Hal ini dikarenakan terdapat dampak negatif dari referendum Brexit pada Juni 2016 yang kemudian mendorong penurunan migrasi dari UE. Dampak negatif ini dapat dilihat dari negosiasi antara Inggris dan UE yang tidak pasti dan mengalami tarik ulur khususnya dalam hubungan perdagangan, yang kemudian memberikan dampak pada penurunan nilai tukar mata uang poundsterling dan secara tidak langsung berpengaruh pada investasi, impor, dan ekspor Inggris (Graziano, Handley, dan Limao, 2021).

Pembalikan arus migrasi kemudian dapat dijelaskan oleh sistem imigrasi baru yang meliberalisasi akses ke pasar tenaga kerja Inggris untuk warga negara non-Uni Eropa yang terampil. Namun disisi lain juga mewajibkan visa untuk warga negara Uni Eropa yang sebelumnya tidak pernah menghadapi batasan. Izin kerja hanya dapat diperoleh bagi mereka yang berada di atas tingkat keterampilan dan gaji tertentu.

Hal ini membuat sebagian besar industri berketerampilan rendah, yang sebelumnya sangat bergantung pada pekerja UE, tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan visa kerja, dan mendorong peningkatan migrasi non-UE, mengurangi kekurangan di beberapa sektor dan pekerjaan. Akibat turunnya harga mata uang poundsterling dan kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan sektor ekonomi Inggris mengalami rintangan dalam memenuhi pasar maka efisiensi aliran migrasi yang dialami oleh Inggris mengalami penurunan.

c. Karakteristik Migran

Dalam menetapkan negara tujuan untuk melakukan tindakan migrasi pada umumnya mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya perjalanan, akomodasi, tingkat penerimaan kerja, perbandingan upah minimum daerah asal dengan daerah tujuan. Terkadang pertimbangan ini juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti kontak

dengan kerabat maupun teman di daerah tujuan. Tindakan migrasi juga dilakukan karena dipicu oleh pengetahuan bahwa adanya peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain (Davin, 1999) .

Derajat seleksi positif meningkat seiring dengan kesulitan mengintervensi rintangan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Lee, Migran cenderung bersifat selektif. Terdapat banyak perbedaan yang akan dilakukan oleh para migran dalam mengatasi rintangan. Kemunculan Brexit menjadi sebuah rintangan baru untuk para warga negara Inggris untuk melakukan migrasi begitu pula untuk warga UE yang ingin memasuki Inggris. Akan tetapi kesulitan dalam menghadapi rintangan ini kemudian akan memunculkan migran yang dinilai lebih mampu atau lebih kompeten karena mampu menghadapi rintangan yang ada sehingga memunculkan derajat seleksi positif diantara migran yang ada.

Grafik 3. Peringkat Paspor Inggris tahun 2015-2023



Sumber: <https://www.henleyglobal.com/>

Maka dari itu meski Brexit menciptakan rintangan untuk warga UE, kebijakan ini malah menjadi sebuah kesempatan untuk warga non-UE. Kebijakan visa yang diliberalisasi secara khusus akan membantu negara-negara miskin untuk mengambil lebih banyak keuntungan dari globalisasi ekonomi. Hal inilah yang kemudian membuat Paspor Inggris mampu untuk meningkatkan ranking paspornya. Munculnya Brexit kemudian membuat Inggris dapat melakukan kerjasama dengan negara di luar UE tanpa adanya pembatasan yang berlaku. Seperti pada grafik 4.2.3.2, ranking Paspor Inggris mulai meningkat dari tahun 2021. Pada tahun 2021, Paspor Inggris meraih posisi ke-7 dimana Inggris mendapatkan akses bebas visa ke 173 negara. Kemudian pada tahun 2022, Paspor Inggris meraih posisi ke-6 dengan akses bebas visa ke 187 negara dan pada tahun 2023, Paspor Inggris meraih posisi ke-4 dengan akses bebas visa ke 190 negara.

Turun dan naiknya peringkat Paspor Inggris sebenarnya dikarenakan adanya ketidakstabilan antara hubungan UE dan Inggris sehingga membuat beberapa kerjasama diantara keduanya berada di posisi yang kurang jelas. Akan tetapi setelah resminya Brexit, hubungan antara keduanya sudah terlihat lebih jelas dimana dalam hal ini meski Inggris bukanlah bagian dari UE dan tidak lagi berada didalam skema pergerakan bebas

UE. Inggris dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara UE secara terpisah terkait kegiatan migrasi diantara keduanya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Lee, karakteristik migran juga membahas akan tanggapan migran terhadap faktor-faktor positif dan negatif di daerah tujuan maupun daerah asal. Dalam rentang waktu masa transisi hingga penyelesaian Brexit, terdapat beberapa faktor tambahan yang muncul akibat adanya Brexit. Faktor tersebut antara lain adalah pandemi Covid-19 yang terjadi antara tahun 2019-2021, kematian Ratu Elizabeth II, dan pergantian perdana menteri Inggris.

1. Tanggapan migran terhadap Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan besar dalam semua kehidupan terutama dalam hal migrasi. Memahami migrasi internasional ketika pergerakan manusia dibatasi untuk menangani Covid-19 serta pada saat terjadi perubahan setelah Brexit merupakan sebuah tantangan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada arus migrasi masuk dan keluar Inggris melainkan juga berdampak terhadap penutupan bisnis secara terpaksa baik yang bersifat sementara maupun permanen, sehingga pekerja lokal dan migran menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan (Mcneil, 2023).

Pandemi Covid-19 juga telah sangat mempengaruhi pola migrasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bagaimana pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam melakukan tindakan migrasi. Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah menerapkan Lockdown nasional dan regional yang kemudian berdampak pada munculnya kebijakan bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut secara signifikan menurunkan mobilitas manusia dalam jangka pendek seperti perjalanan sehari-hari dan pariwisata, dan juga mempengaruhi pilihan lokasi tempat tinggal khususnya, penduduk yang telah memutuskan untuk pindah ke luar kota-kota besar karena dampak pandemi (Haslag & Weagley, 2021; Willberg et al., 2021).

2. Tanggapan Migran Terhadap Kematian Ratu Elizabeth II

Meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis, 8 September memberikan dampak yang sangat mendalam bagi Inggris. Situasi tersebut membuat Inggris kini telah berada di dalam masa berkabung selama 10 hari, kematian Ratu Elizabeth II kemudian juga turut memperlambat perekonomian yang semakin melemah mengingat sebelumnya terdapat faktor dari inflasi dua digit, risiko resesi, banyak aksi pemogokan, dan jatuhnya nilai mata uang poundsterling (Apetogbor, 2022).

Di bawah pemerintahan Charles, monarki di Inggris kemungkinan besar tidak akan bertahan seperti dibawah pemerintahan era Elizabeth. Banyak dari citra publik Charles telah dibentuk oleh masa jabatannya sebagai Pangeran Wales, termasuk beberapa skandal dalam kehidupan pribadinya serta pandangannya dalam berbagai isu seperti perubahan iklim, Tiongkok, dan taktik kontroversial pemerintah Inggris untuk menghalangi imigrasi. Jika Ratu mempertahankan reputasinya sebagai orang yang tidak memihak pada sisi apapun dan memilih untuk tidak ikut campur serta menyerahkan urusan politik kepada para politisi, Pangeran Charles melakukan hal yang sebaliknya. Saat Charles masih menjadi pangeran dia melangkah lebih jauh didalam politik dengan mengambil beberapa tindakan kontroversial seperti

mengakuisisi menteri-menteri pemerintah mengenai sejumlah isu, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap peran netral dan seremonial monarki dalam politik Inggris (Serhan, 2022).

Naiknya Charles menjadi raja mengganti mendiang Ratu Elizabeth II juga menimbulkan banyak protes lantaran beberapa orang berpendapat bahwa menghabiskan jutaan dolar untuk pesta penobatan monarki baru Inggris adalah hal yang tidak masuk akal di tengah krisis biaya hidup yang telah menyebabkan inflasi sebesar 10%, mendorong ribuan orang ke bank makanan, dan memicu pemogokan selama berbulan-bulan oleh perawat, guru, dan pekerja lain yang mencari gaji lebih tinggi (Lawless, 2023). Bahkan saat hari penobatan Raja Charles yakni pada tanggal 6 Mei 2023, terdapat pengunjuk rasa yang meneriakkan “Not my king” saat prosesi penobatan berlangsung.

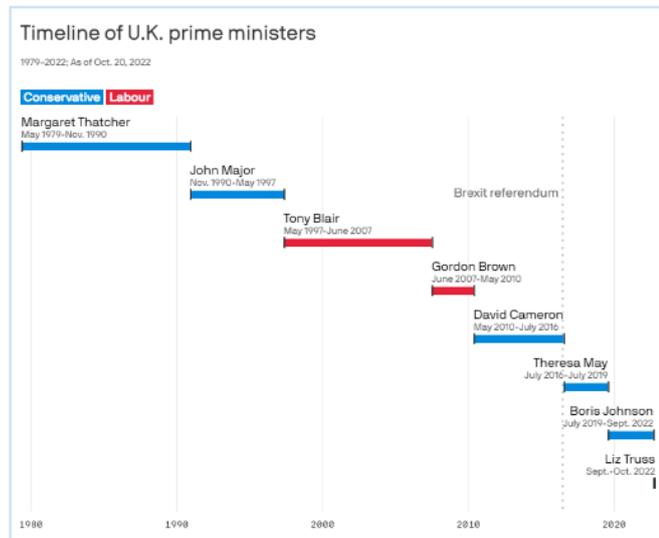
Dari hal-hal tersebut, banyak masyarakat yang merasa skeptis untuk berada dibawah pemerintahan Raja Charles. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk para migran melakukan migrasi ke Inggris. Mengingat adanya ketidakstabilan politik dalam negeri di Inggris yang dapat mempengaruhi hidup mereka nantinya.

3. Tanggapan Migran Terhadap Pergantian Perdana Menteri Inggris

Inggris telah terjebak dalam krisis terkait kepala pemerintahan sejak negara tersebut memutuskan untuk meninggalkan UE pada tahun 2016 yang dikenal dengan Brexit, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai masa depan negara tersebut yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Imigrasi kemudian memainkan peran besar dalam kampanye Brexit. Keputusan untuk mengadakan referendum mengenai keanggotaan Inggris di UE dibuat oleh Perdana Menteri David Cameron sesuai janjinya pada bulan Januari 2013.

Akan tetapi dalam referendum tersebut, Inggris memberikan suara untuk meninggalkan UE dengan selisih 52% berbanding 48% (BBC, 2016). Perdana Menteri David Cameron memutuskan untuk mengundurkan diri karena ia percaya bahwa Inggris lebih kuat, lebih aman, dan lebih baik di dalam UE. Namun tampaknya rakyat Inggris telah mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang berbeda sehingga menurutnya negara tersebut memerlukan kepemimpinan baru untuk mengambil keputusan tersebut.

Setelah pengunduran diri David Cameron, Theresa May kemudian maju menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Namun setelah 3 tahun, Theresa mungkin memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Hal ini terutama terjadi karena di bawah pemerintahan Theresa, Inggris telah tiga kali gagal mendapatkan persetujuan parlemen atas kesepakatan penarikan diri dan terus memperpanjang batas waktu keluarnya Inggris dari negara tersebut. Setelah gagal untuk ketiga kalinya mendapatkan persetujuan parlemen, pada tahun 2019 Theresa secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya.

Tabel 1. Linimasa masa jabatan perdana menteri Inggris

Sumber: <https://www.axios.com/>

Boris Johnson kemudian menggantikan Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru pada tahun 2019. Namun seperti Theresa May, Boris Johnson mengundurkan diri dari jabatannya kurang dari tiga tahun kemudian setelah serangkaian skandal. Skandal yang paling besar adalah terkait pelecehan seksual dan partygate dimana ia menghadiri acara perkumpulan di hari ulang tahunnya yang saat itu sedang diterapkan aturan lockdown (Amos, 2022). Serangkaian skandal ini membuat masyarakat Inggris semakin skeptis terhadap pemerintahan dibawah Boris Johnson karena mereka percaya orang tersebut seharusnya tidak menjadi seorang pemimpin.

Boris Johnson kemudian digantikan oleh Liz Truss. Yang kemudian hanya bertahan selama enam minggu sebelum akhirnya dia juga mengundurkan diri. Salah satu tindakan pertama Liz Truss saat menjabat jadi Perdana Menteri adalah mencoba menutup kesenjangan anggaran yang sangat besar dengan pemotongan pajak yang tidak didanai. Akibatnya pasar keuangan Inggris semakin memburuk dan nilai poundsterling semakin jatuh. Liz Truss terpaksa mengundurkan diri setelah sekitar enam minggu, menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Inggris (Langfitt, 2022). Kerajaan Inggris dulunya identik dengan pemerintahan yang stabil dan dapat diandalkan. Namun pengunduran diri Perdana Menteri Liz Truss pada hari Kamis setelah enam minggu menjabat menunjukkan betapa kacaunya politik Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi jika mengingat bahwa setelah terjadinya Brexit, Perdana Menteri Inggris kerap kali diganti.

Kesimpulan

Merujuk kembali dari seluruh data maupun analisis yang telah penulis temukan selama penulisan penelitian. Pergerakan lintas batas dianggap sebagai pedang bermata dua oleh sebagian besar pemerintah negara. Di satu sisi, mereka menyambut manfaat

ekonomi yang biasanya terkait dengan pergerakan seperti itu dalam bentuk pariwisata, perdagangan, dan investasi modal asing, bahkan jika aspek globalisasi ekonomi ini tidak mungkin menguntungkan negara secara setara (Kemeny, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *global passport rank* Inggris. Adanya ketidakstabilan hubungan antara UE dan Inggris membuat adanya hambatan yang muncul dalam tindakan migrasi yang ingin dilakukan oleh warga UE maupun Inggris. Hal ini pun menjadi sebuah kesempatan untuk warga non UE agar dapat memasuki Inggris lantaran mereka bukanlah yang terdampak dari Brexit secara langsung.

Turun dan naiknya Paspor Inggris dalam pemeringkatan Henley Indeks Paspor didasarkan dengan seberapa banyak akses bebas visa yang dapat diterima Inggris. Hal tersebut kemudian berdampak pada angka migrasi yang terjadi di Inggris. Sehingga terjadinya penurunan peringkat paspor Inggris didalam *Global Passport Power Rank* juga turut diindikasikan dengan adanya penurunan angka migrasi di Inggris yang dilihat dari sisi alasan untuk bermigrasi, rintangan yang akan dihadapi, serta persepsi internasional negara Inggris.

Daftar Pustaka

- Adam S. Posen. 2022. "The UK and the global economy after Brexit", tersedia di <https://www.piie.com/research/piie-charts/uk-and-global-economy-after-brexit#:~:text=Brexit%20has%20reduced%20UK%20trade,in%20the%201990s%20and%20200s>.
- Akman, W. 2016. The facilitating role of visa policies on international trade and foreign direct investment. Tersedia di <http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2016.1232589>
- Amos, O. 2022. "Boris Johnson resigns: Five things that led to the PM's downfall", tersedia di <https://www.bbc.com/news/uk-politics-62070422>
- Apetogbor, C. 2022. "How Queen Elizabeth II's death could impact the UK economy", tersedia di https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2022/09/13/how-queen-elizabeth-s-death-could-impact-the-british-economy_5996722_19.html
- BBC. 2016. "Brexit: David Cameron's resignation statement in full", tersedia di <https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36619446>
- Czaika, M., dan Neumayer, E. 2017. Visa restrictions and economic globalisation. Tersedia di <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014362281630488X>
- Davin, D. 1999. Why People Migrate. In: Internal Migration in Contemporary China. Tersedia di https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230376717_5
- European Commission. 2021. "The EU-UK Trade and Cooperation Agreement", tersedia di https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
- European Commission. (n.d). "Legal Migration and Integration", tersedia di https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration_en
- Graziano, A.G., Handley, K. dan Limão, N. 2021. Brexit uncertainty and trade disintegration. Tersedia di <https://academic.oup.com/ej/article-abstract/131/635/1150/5912355>
- Haslag, P. H., & Weagley, D. 2021. "From L.a. to Boise: How migration has changed during the COVID-19 pandemic". SSRN Electronic Journal. Tersedia di <https://doi.org/10.2139/ssrn.3808326>.

- Henley Global. n.d.. "The Henley Passport Index", tersedia di <https://www.henleyglobal.com/passport-index>
- Kemeny, T. 2011. Are international technology gaps growing or shrinking in the age of globalization?. tersedia di https://econpapers.repec.org/article/oupjecgeo/v_3a11_3ay_3a2011_3ai_3a1_3ap_3a1-35.htm
- Langfitt, F. 2022. "3 prime ministers, 2 monarchs, 1 year: This was Britain's tumultuous 2022", tersedia di <https://www.opb.org/article/2022/12/30/3-prime-ministers-2-monarchs-1-year-this-was-britain-s-tumultuous-2022/>
- Lawless, J. 2023. "'Not my king': UK republicans want coronation to be the last", tersedia di <https://apnews.com/article/king-charles-coronation-opponents-republican-protest-6aab62a8c337568386914e6374a709be>
- Lee, E. S. 1996. A Theory of Migration. Demography. tersedia di <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Mathers, M. 2023. "Why is migration to the UK on the rise?", tersedia di <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/migration-rise-uk-economy-b2302159.html>
- Mcneil, R. 2021. "COVID-19 and migration in the UK", tersedia di <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/projects/covid-19>
- Mcneil, R. 2022. "EU Migration to and from the UK", tersedia di <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/>
- Serhan, Y. 2022. "The Future of the British Monarchy Is More Uncertain Than Ever", tersedia di <https://time.com/6212370/british-monarchy-future-king-charles-iii/>
- Sumption, M. & Walsh, P.W. 2022. "EU Migration to and from the UK", tersedia di <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/>
- Sumption, M. 2022. "Why has non-EU migration to the UK risen?", tersedia di <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/why-has-non-eu-migration-to-the-uk-risen/>
- Willberg, E., Järv, O., Väisänen, T., & Toivonen, T. 2021. "Escaping from cities during the covid-19 crisis: Using mobile phone data to trace mobility in Finland". ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(2), 103. Tersedia di <https://doi.org/10.3390/ijgi10020103>.